

**KOLABORASI STAKEHOLDERS
DALAM PENGEMBANGAN AGROWISATA JAMBU KRISTAL
(Studi di Desa Padang Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro)**

Agisna Safarina N., Rupiarsieh, Ahmad Taufiq

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bojonegoro

Jl. Lettu Suyitno, No.2, Kec.Bojonegoro

Email : taufiq.alfazka@gmail.com

Abstraction

Crystal guava agro-tourism in Padang Village, Bojonegoro Regency, has been established since it was ratified through the Regent's Decree No. 188/134/KEP/412.11/2016 concerning the 2016 Agropolitan Area Development Working Group. However, problems still arise. Among others lack of trust from the stakeholders involved. This study aims to explore it more deeply with the theory of deseve success.

This type of research uses descriptive qualitative methods. Collecting data using interview, observation, and documentation techniques. This study uses primary and secondary data sources. Determination of informants using purposive sampling technique, then, the data were analyzed using the interactive analysis method Miles & Huberman.

The results of the study show that collaboration in general is good enough but there are still shortcomings, namely: (1) Internal legitimacy is not complete so that collaboration is still semi-formal (2) Commitment to the realization of road construction which is still rocky has not been implemented and (3) There are ego-sector issues.

Keywords: Collaboration, Stakeholders, Agrotourism Development

Abstraksi

Agrowisata jambu kristal di Desa Padang Kecamatan Kabupaten Bojonegoro sudah terbentuk sejak disahkan melalui SK Bupati No. 188/134/KEP/412.11/2016 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan 2016. Namun, permasalahan masih muncul. Antara lain kurangnya kepercayaan dari *stakeholder* yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk lebih dalam mengupasnya dengan teori keberhasilan *deseve*.

Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, Kemudian, data dianalisis dengan metode analisis interaktif Miles & Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan kolaborasi secara umum sudah cukup baik namun masih terdapat kekurangan yaitu: (1) Legitimasi dari internalnya belum lengkap sehingga kolaborasi masih bersifat semiformal (2) Komitmen realisasi pembangunan jalan yang masih berbatu belum terlaksana dan (3) Terdapat isu egosektor.

Kata kunci : Kolaborasi, Stakeholder, Pengembangan Agrowisata

PENDAHULUAN

Bojonegoro sudah mendapatkan penetapan Kawasan Agropolitan oleh Provinsi Jatim sejak 2008 dengan 3 kawasan; yakni Kapas, dengan potensi salak; Kalitidu, dengan potensi belimbing; dan Dander dengan minapolitan. Namun sejak 2016 Kabupaten Bojonegoro melakukan perluasan daerah pertanian berbasis agropolitan sejak dikeluarkannya Keputusan Bupati Bojonegoro No: 188/134/KEP/412.11/2016 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Bojonegoro 2016. Pengembangan kawasan agropolitan tersebut ditambah dengan Kecamatan Trucuk. Yaitu di Desa Padang, Mori, Pagerwesi.

Keberhasilan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Bojonegoro diapresiasi oleh Ketua Pokja Bappeda Provinsi Jawa Timur sebagai 3 pelaksana terbaik peraih penghargaan dalam ajang Agropolitan Awards 2019 yang diikuti oleh 25 Kabupaten / Kota Se Jawa Timur. Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Bojonegoro yaitu Kapas dengan potensi salak, Kalitidu dengan Potensi Belimbing, Dander dengan minapolitan, dan penambahan terakhir sejak di keluarkannya Keputusan Bupati 2016 yaitu Trucuk dengan Potensi Jambu.

Program pengembangan kawasan agropolitan/minapolitan merupakan program unggulan Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan potensi kawasan pedesaan berbasis komoditas hortikultura untuk memperkecil *gap* pembangunan antara pedesaan dengan perkotaan, pengembangan komoditas atau produk dari hulu ke hilir, mungurangi urbanisasi, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Semua Kawasan Agropolitan di Bojonegoro memiliki beberapa karakteristik yaitu salah satunya dengan memadukan sector pertanian dengan

pariwisata atau yang lebih dikenal dengan konsep agrowisata. Agrowisata termasuk dalam lingkup (ecotourism) yaitu perjalanan wisata yang tidak merusak ataupun mencemari lingkungan, dengan tujuan sebagai sarana edukatif pertanian serta sarana menikmati keindahan alam, tumbuhan, dan hewan liar lainnya.

Pemilihan Desa Padang Kecamatan Trucuk dalam penelitian ini dikarenakan Desa Padang lebih memiliki potensi untuk berkembang serta agrowisata cukup berhasil meningkatkan perekonomian petani setempat. Agrowisata Jambu Kristal di Desa Padang sangat dekat dengan Bendungan Gerak maka sangat potensial digunakan sebagai sarana irigasi serta kawasan lahan yang gembur menjadikan budidaya jambu dapat tumbuh subur disana. Bendungan Gerak sendiri merupakan sebuah bendungan bengewangan solo yang dibangun untuk tata kelola air (mencegah banjir meluap ketika musim hujan), sekaligus sebagai penghubung akses wilayah ke Kota Bojonegoro.

Pada gilirannya, pemerintah tentunya memiliki keterbatasan sumber daya maupun jaringan. Oleh karenanya pemerintah tidak hanya mengandalkan kapasitas (kemampuan) internal yang dimiliki. Maka pemerintah terdorong melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan para stakeholder baik dengan sesama pemerintah pihak, swasta, maupun komunitas masyarakat sipil dalam penerapan sebuah kebijakan (Hermawanti, 2021).

Kolaborasi dalam Ilmu Administrasi Publik dikenal sebagai *Collaborative Governance*, atau juga *Collaborative Public Management*, dan bisa lagi disebut *Collaborative Network Management*. Walaupun penggunaan istilah tersebut memiliki pemaknaan yang sama, namun pendapat para ahli mengklasifikasinya menjadi berbeda dalam karakteristik khas dan lingkupan penggunaannya (Kapucu dkk, 2009).

Kolaborasi dalam *governance* dari berbagai ranah ilmu kajian seperti kajian

hubungan antar aktor pemerintah, tindakan kolektif bersama swasta, demokrasi deliberatif, pergerakan masyarakat serta swasta, manajemen *public* lintas sektor.⁷ Selanjutnya Sudarmo mengemukakannya sebagai berikut: “*collaborative governance* memerlukan sejumlah institusi (kelompok beserta para pemukanya) yang berpartisipasi dalam *governance* (penataan, penertiban, pembinaan, pemberdayaan atau pengelolaan kelompok marginal).

Dalam Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan, proses perencanaan yang terjadi adalah perpaduan antara desa dengan kabupaten. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyatakan bahwa seharusnya yang lebih berperan disini adalah pihak desa yang secara sadar dan mandiri untuk mengelola desanya menjadi kawasan agropolitan. Selanjutnya dalam Pendanaannya, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memberikan dana stimulasi sarana prasarana yang bersifat *public* dan strategis seperti gazebo, pemavingan ataupun pelatihan. Yang terakhir tahap pengawasan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengadakan rapat koordinasi, rapat ini sebagai sarana *monitoring* dan evaluasi kegiatan desa – desa yang ditetapkan sebagai kawasan agropolitan (Supriyanto, 2016).

Support pemerintah daerah salah satunya juga dijelaskan dalam forum pembinaan untuk pendataan IDM tahun 2020. Kepala Daerah Bu Anna Muawanawah memaparkan: “contohnya, bantuan BUMDes 100 juta yang berbasis agribisnis dan agrowisata. Harusnya kalau telah memiliki kawasan pariwisata, memiliki orang, SDM pengelola, harusnya berkembang, karena memiliki kawasan teritorial. Misal saat musimpanen musim hujan harga anjlok, pembeli dari luar banting harga, desa rembug bareng – bareng, BUMDesnya untuk menangani itu. Tujuan pemkab untuk menjawab persoalan petani.”

Pernyataan Kelompok Tani diatas mengindikasikan menurunnya komitmen dan isu kurang percaya terhadap pemerintah. Oleh karenanya dalam menyelesaikan masalah ini diperlukan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak terhadap pengembangan agrowisata, supaya terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih baik lagi.

Secara teoritik, kolaborasi dalam ilmu Administrasi Publik diungkapkan oleh Fredericson (2002), bahwa istilah administrasi *public* biasanya digunakan untuk menggambarkan administrasi pemerintahan, sehingga kajiannya hanya membahas masalah politik, anggaran, kepegawaian dan penyediaan pelayanan. *Public* dalam lingkungannya menyangkut masalah *public* yang lebih luas bukan sekedar organisasi pemerintahan. Namun meluas ke organisasi *non public* dan kesemuanya berinteraksi satu sama lain.

Islamy H (2018) menyimpulkan klasifikasi kolaborasi Goddard merupakan hubungan antar pemerintah dan organisasi *sector* ketiga telah terjadi pergeseran dari struktur birokrasi administrasi formal ke model yang bersifat kolaboratif. Kolaborasi merupakan jenis gambaran hubungan yang saling mengisi, khususnya hubungan pemerintah dengan lembaga nirlaba, dengan organisasi *sector* ketiga dengan organisasi kemasyarakatan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi merupakan bagian dari kajian administrasi publik.

Sedangkan *governance* berasal dari makna “*Action of Manner of Governing*” (kegiatan yang identic dengan pemerintahan). Kooman dalam Huges (2010) mencirikan *governance* sebagai kegiatan administrasi, yaitu kegiatan yang berlandaskan kaidah normative dalam seluruh kegiatannya sehingga terjadi interaksi pemecahan masalah sosial antar aktor – aktor publik.

Ada perbedaan makna antara *governance* dan *government*. Dalam *government*, adanya karakteristik struktur bejenjang dimana pemerintah ialah aktor

utama dan rakyat ikut serta dengan hanya patuh. Sedangkan *governance* lebih luas, tidak hanya memiliki ciri struktur berjenjang namun juga terjadi kesetaraan masing masing aktor dengan perbedaan tanggung jawab yang diemban, serta lebih menekankan kualitas partisipasi masyarakat.

Kolaborasi berasal dari kata (*with , together, or jointly*) dan *laborate (to labor = workers considered as group)*. Agranoff & McGuire (2003) menemukan bahwa kolaborasi ialah kesepakatan bersama beberapa organisasi untuk memecahkan problem yang sulit di capai oleh satu organisasi saja sehingga perlunya aktivitas aktivitas yang bersifat vertical maupun horizontal dalam proses kolaborasi tersebut.

Ansell& Gash (2007) mengemukakan bahwa kolaborasi di dalamnya memiliki 6 kriteria (1) forum kolaborasi di inisiasi pemerintah (2) *participant* di dalam forum termasuk aktor non pemerintah juga (3) peran pemerintah sebagai pembuatan keputusan tunggal tidak ada namun berdasarkan keputusan bersama *participant* (4) forum organisasi ada secara formal untuk mencapai konsesus (keputusan bersama) (5) meskipun konsesus tidak tercapai dalam prakteknya keputusan berdasarkan konsesus merupakan tujuan forum.(6) fokus kolaborasi ialah menejemen publik.

Terkait sifat kolaborasi dari jenjang formalitasnya, interaksi lintas sector *collaborative governance* bisa berjalan melembaga melalui perjanjian atau kontrak formal dan kontrak informal. Memang sekarang banyak hubungan kolaborasi melalui kesepakatan kontrak atau kesepakatan formal sehingga mudah dijelaskan para stakeholder yang terlibat, mudah menjelaskan prosedur dan tujuannya. Namun bila interaksi kolaborasi dilakukan melalui kesepakatan informal maka cenderung lebih sulit untuk dianalisa namun tetap bisa dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian di obyek penelitian yaitu agrowisata Desa Padang dan aktor (*stakeholder*) yang terlibat yaitu (1) pemerintah desa Padang (2) dinas pariwisata (2) dinas pertanian (3) dinas lingkungan hidup. Teknik penentuan informan menggunakan *Purposive sampling*, dengan jumlah 10 informan, dari pihak desa, pengelola agrowisata, dan dinas terkait. Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Sedangkan analisis data menggunakan model Miles & Huberman.

Fokus penelitiannya, mengacu pada Indikator keberhasilan kolaborasi (*collaborative governance*) mengacu pada Sudarmo (2011) yang bertumpu pada enam poin. Yakni, (a) *Networked Structure* (struktur jaringan); *Commitment to a common purpose* (komitmen terhadap tujuan); (c) *Trust among the participants* (adanya kepercayaan bersama antara pelaku /peserta yang terhubung dalam jaringan); dan (d) *Governance* (kejelasan dalam administrasi).

Khusus dalam *governance*, mengacu pada *Boundary dan exclusivity, Rules* (aturan), *Self Determination, Access to authority* (akses terhadap kekuasaan), *Distributive accountability responsibility* (pembagian akuntabilitas/ responsibilitas), *Information sharing*, (berbagi informasi), dan *Access to resources* (akses terhadap sumberdaya).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Indikator Keberhasilan Stakeholder Struktur Jaringan

Bentuk dari kolaborasi secara eksternal sudah ada dan regulasinya diatur Pemerintah Daerah sesuai dengan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/134/KEP/412.11/2016 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016. Secara eksternal administrative, tugas

dan keterlibatan dinas sesuai tugas dan fungsi di bidang masing-masing. Misalnya, keterkaitan Dinas LH dengan Agrowisata yaitu pengelolaan sampah agro melalui Bank Sampah.

Secara administratif internal antara Pemerintah Desa dengan Pokdarwis dan dengan Dinas Pariwisata, belum terdapat kontrak atau kesepakatan tertulis. Namun, kelompok tani sudah dibentuk secara khusus dalam pengembangan agro jambu. Kelembagaan BUMDes juga diakui belum ada. Sehingga, bentuk kolaborasinya mengarah pada *self governance* (semiformal) dan beberapa sudah dilegitimasi oleh Pemda. Keadaan ini kurang menguntungkan mengingat jaringan kolaborasi sudah dilakukan oleh banyak *stakeholder* dan kurang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pencapaian tujuan.

Komitmen terhadap Tujuan

Pada indikator ini komitmen dikaji melalui upaya yang dilakukan setiap *stakeholder* untuk mengoptimalkan perannya masing-masing. Pemerintah Desa mengoptimalkan perannya dalam mewujudkan tujuan pengembangan agrowisata dengan berkomitmen mengusulkan pembangunan fasilitas-fasilitas penunjang dalam lingkungan agrowisata seperti pembangunan akses jalan, pengembangan variasi jambu dan juga pemanfaatan lahan kosong. Komitmen pemerintah desa ini sangat penting terhadap pengembangan agrowisata dimana nantinya akses jalan merupakan hal yang fundamental dan langsung dirasakan oleh para wisatawan yang berkunjung ke desa Padang.

Sedangkan komitmen Dinas Pariwisata mengoptimalkan perannya berupa menyusun data kunjungan guna sebagai data untuk penyelesaian solusi dan langkah pembinaan selanjutnya. Pembinaan ini penting adanya untuk mewujudkan kemandirian petani dan

pada nantinya secara bersama dapat menerapkan CHSE pada lingkungan agrowisata. Pembinaan-pembinaan serupa juga menjadi komitmen bagi PPL dan SKPD yang terlibat.

Sementara komitmen Dinas Pertanian mengarah pada ketersediaan bibit.

“Komitmen kami adalah memberikan bantuan teknis dan bibit kepada petani, lalu berkoordinasi dengan PPL apabila ada permasalahan seperti overload kita bantu memasarkan dengan menginformasikan ke orang-orang sekitar agar banyak membeli.” (Wawancara dengan Imam Nur Hamid, sub bagian penyuluhan Disperta, 23 Juli 2021)

Komitmen pihak lain juga disesuaikan dengan bidangnya. Seperti Dinas Lingkungan Hidup berkaitan dengan kebijakan strategi daerah untuk pengurangan dan penanganan sampah. Begitu juga kelompok tani, para pedagang, dan Pokdarwis, berkomitmen untuk terus menanam dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi seperti internet.

Secara umum komitmen yang terjadi antar masing-masing *stakeholder* terhadap perkembangan agrowisata sudah baik. Setiap *stakeholder* berkomitmen sesuai dengan perannya dalam mengembangkan agrowisata meskipun pada praktiknya ada beberapa komitmen pembangunan realisasi infrastruktur jalan yang masih belum terlaksana sampai sekarang.

Adanya Sikap Saling Percaya

Indikator ini berupa terikatnya hubungan profesional yang saling mempercayai antara partisipan dan *stakeholder* demi terwujudnya tujuan bersama. Pemerintah desa dalam rangka membangun kepercayaan kepada kelompok tani dengan melakukan pembinaan-pembinaan setiap kali pada masa panen raya.

Selain membangun kepercayaan pada kelompok tani, pemerintah desa juga membangun kepercayaan kepada *stakeholder* lain dengan rutin melakukan komunikasi.

Namun, ada temuan bahwa pemerintah desa masih ada ego sektor kepada kelompok tani dan pokdarwis. Pemdes menilai pokdarwis masih belum terlalu aktif dengan asumsi jarangnyanya kegiatan ataupun agenda yang melibatkan pokdarwis dan kelompok tani. Dan ini menyebabkan pokdarwis terkesan kurang maksimal dalam mengembantugasnya.

Upaya membangun kepercayaan dari beberapa *stakeholder* diterima baik oleh para petani yang terwakili oleh kelompok tani. Secara umum kelompok tani sudah memiliki kepercayaan yang baik kepada dinas terkait. Namun, kepada pemerintah desa dan pokdarwis, masih belum ada rasa percaya yang cukup baik.

Kejelasan Tata Kelola

Indikator ini terdiri dari *boundary dan exclusivity, rules, dan self determination*. *Boundary* dan *exclusivity* meliputi penegasan siapa yang termasuk anggota dan yang bukan anggota. Ketegasan siapa termasuk anggota secara eksternal tertuang dalam Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016. Misalnya, peran dinas-dinas terkait seperti dinas pariwisata, dinas pertanian, dinas lingkungan hidup, ikut membantu, kecamatan, desa, juga terlibat dan sudah ada SK pokja dari Bupati.

Selain itu kejelasan tata kelola dari dimensi *rules* aturan tertulis maupun tidak tertulis serta kejelasan tata kelola dari dimensi *self determination* yakni kebebasan dalam menjalankan kolaborasi para *stakeholder* punya pandangan berbeda. Pemerintah desa

menilai adanya SK Bupati menjadikan *stakeholder* memiliki kejelasan dalam menjalankan perannya masing-masing.

Perspektif *governance* dari Dinas Pariwisata, berperan sebagai pihak yang memfasilitasi produk petani untuk promosi. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup.

"Untuk peraturan bersama seluruh *stakeholder* belum ada. Namun, dengan pihak desa kami punya SK Kepala Desa Padang Nomor 188/22/KEP/22.2005/2019 tentang Bank Sampah. Jadi proses kerjasamanya berupa pembuatan bank sampah, kalau akta notaris dibentuk. Untuk peraturan perilaku, kita support bantuan kendaraan tassa untuk bank sampah." (Wawancara Muhayanah, subbidang pengelolaan sampah dan RTH DLH, 22 Juli 2021).

Akses terhadap kewenangan

Dalam pemberian otoritas, pemerintah desa menjalankannya dengan baik. *Stakeholder* lain bebas melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ada. Mereka bebas berkarya selama karya tersebut tidak menyalahi prosedur. Hal ini merupakan suatu langkah yang bagus karena dari pihak pemerintah sudah memberikan kebebasan akses kepada pihak lain terutama kepada pihak yang terlibat langsung di lapangan seperti kelompok tani dan juga pedagang sehingga mereka merasa aman dan dapat berkarya dengan kemampuan dan peran masing-masing.

Pembagian tanggung jawab

Terdapat pembagian tanggung jawab dalam kolaborasi (penataan manajemen bersama para *stakeholder* berbagi pembuatan keputusan yang rata kepada seluruh anggota dengan demikian pembagian tanggungjawab ini akan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, tugas masing-masing *stakeholder* sudah

diatur oleh Pemkab dalam Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016, termasuk bagaimana prosedur yang harus dijalankan.

Dalam hal perencanaan pembangunan agro, pemerintah desa membahasnya dalam musrenbang dan diusulkannya anggaran terkait sarana dan prasarana ke Pemkab. Untuk jalan yang selama ini masih jadi kendala dan dikeluhkan masyarakat, untuk pengusulan atau pembangunannya masih pending. Alasannya, Desa masih berfokus pada penanganan pandemi. Dan juga untuk monev di tingkat desa belum dilaksanakan. Hanya ada pertemuan setahun sekali oleh Pemerintah Desa dengan Petani Agro.

Berbagi informasi

Pembagian informasi yang berhubungan dengan pengelolaan agrowisata, termasuk dalam system, software, dan prosedur yang aman, sudah dijalankan dengan cukup baik. Pembagian Informasi dari Pemerintah Desa, misalnya, setahun sekali mengadakan pembinaan saat panen raya. Pihaknya selalu berkoordinasi dengan kelompok tani, camat, PPL, dinas pariwisata, dan dinas pertanian. Promosi juga jambu melalui website desa.

Seluruh pihak menyadari pentingnya pembagian informasi. Meski dalam realisasi musyawarah atau duduk bersama dalam satu forum jarang dilakukan. Namun, semua pihak tetap bisa saling berkoordinasi dengan baik dengan memanfaatkan teknologi, seperti WAG. Sehingga, pembagian informasi sangat mudah dilakukan.

Secara umum pembagian informasi dapat dikelompokkan sebagai berikut.

(a) Pertemuan langsung berupa undangan rapat, kunjungan, dan musyawarah. (b) Koordinasi secara tidak langsung berupa : komunikasi

melalui group wa, medsos, dan telepon. Dan (c) promosi ke luar melalui website dinas pariwisata, ig dinas pariwisata, website desa, berita online, surat kabar, dan stasiun berita TV.

Akses terhadap sumberdaya

Indikator ini berupa sejauhmana ketersediaan sumber daya manusia, sumberdaya teknis, sumberdaya keuangan, serta sarana prasarana untuk mencapai tujuan kolaborasi (network). Sumber daya sarana dan prasarana untuk agrowisata berasal APBdes. Setiap pembangunan yang ada di agro, diusulkan melalui musrenbang dari desa sampai kecamatan. Kemudian, jika ada pencairan, baru dibangun. Terkait SDM petani, juga cukup baik.

SIMPULAN

Berdasar pemaparan hasil penelitian di atas, diperoleh kesimpulan bahwa, Kolaborasi *Stakeholders* dalam Pengembangan Agrowisata Desa Padang Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro berjalan cukup baik, meski banyak yang harus dibenahi. Hal tersebut ditunjukkan dari elemen kolaborasi yang mayoritas perlu pembenahan:

Struktur Jaringan

Meskipun secara eksternal regulasinya sudah diatur oleh Pemkab, Agro jambu secara administrative dalam internal antara Pemerintah Desa dengan Pokdarwis dan dengan dinas terkait belum terdapat kontrak atau kesepakatan tertulis. Namun, kelompok tani sudah dibentuk secara khusus dalam pengembangan agro jambu. Sementara kelembagaan BUMDes belum aktif. Hal ini cukup menghambat jalannya pengelolaan. Sehingga, bentuk kolaborasinya secara *self governance* (semiformal).

Komitmen terhadap tujuan

Secara umum komitmen pada antar *stakeholder* terhadap pengembangan agrowisata sudah baik. Seluruh *stakeholder*

berkomitmen terhadap tujuan yang lebih baik. Meskipun dalam praktiknya masih ada beberapa komitmen yang belum realisasi, misalnya pembangunan infrastruktur jalan, yang belum terlaksana sampai sekarang.

Kepercayaan Antar Pelaku

Upaya membangun kepercayaan dari beberapa stakeholder sudah diterima baik oleh para petani. Secara umum kelompok tani sudah memiliki kepercayaan yang baik kepada dinas terkait. Namun, kepada pemerintah desa dan kepada pokdarwis masih belum ada rasa percaya yang cukup baik. Hal tersebut lantaran agenda perbaikan jalan yang sampai sekarang belum pernah terealisasi dan juga perspektif kelompok tani mengenai kurang baiknya area parkir.

Kejelasan Tata Kelola

Dalam hal pembagian peran sudah berjalan cukup baik. Masing-masing stakeholder sudah memiliki kejelasan dan pengakuan resmi dengan adanya SK. Namun, dari Pokdarwis belum memiliki SK secara resmi. Meski pokdarwis keanggotaannya belum tergambar dengan jelas, selama ini mereka sudah menjalankan perannya seperti pendataan kunjungan dan mengikuti serangkaian kegiatan pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agranoff, R, dan McGuire, *Collaborative Public Management NewStrategis for Local Governments, Washington, D.C: Georgetown University Press, 2003*
- Fredriscon, George H. ans Kevin B Smith. *The Public Administration : Theory Primer, USA : Westview Press 2002*
- Friedman, Andrew L. dan Samantha Miles, 2006, *Stakeholder : Theoryand Practice. New York Oxford University Press*
- Hughes, Owen. *Does Governance Exist dalam Stephan P. Osborne. The New*

Public Governance. Emerging Perspective on the Theory andPractice of Public Governance New York. Routladge 2010.

- Islamy H, L. S. *Collaborative Governance Konsep dan Teori. Baubau: deepublish. 2018 Kaliba,*
- Keban, Yeremias T, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta : Gava Media,2004*
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif Jakarta : GP Press Group*
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (3 ed.)*, (Y. S. Suryandari,Ed.) Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Alfabeta, 2020. Hal 51-54
- Sudarmo, *Isu - Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance, Surakarta: SmartMedia 2011*
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Afabeta, 2017. Hal 326
- Sugiyono *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta Bandung, 2016
- Sutjipta, I Nyoman, *Agrowisata, Magister Manajemen Agribisnis: Universitas Udayana 2001*
- Utama , I.B.,& Junaedi,I.R., *Agrowisata Sebagai Pariwisata Alternatif Indonesia* ,Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019

Jurnal

- Ansell, Cris, and Alison Gash, *Collaborative Governance in Theory Practice, Journal of Public Administration Research and Theory, 2007*
- Emerson, Nabatchi,& Balogh, “*An Integrative Framwork for Collaborative Governance* “. *Journal of Public Administration Research and Theory, 22:6. 1-29*
- Kapucu , Naim, Farhold Yuldashev, & erlan bakiev (2009), *Collaborative Public Management and Collaborative Governance : Conceptual Similarities and Differences, Eurpean Journal of Economic and Political*

Studies, Vol.2No.1.

Sudarmo Participation efforts of Solo's street vendors in policy formulation during the reform era but without results ALAR: Action Learning and Action Research Journal 15 (1), 107-140

Supriyanto, J. Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Desa Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Kebijakan dan Manajemen Publik, 2016. Hal 15 -17